

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Pada SKPD Kabupaten Bengkalis)**

Oleh:

Nurlaili

Pembimbing : Nur Azlina dan H. Mudrika Alamsyah Hasan

*Departement of Accounting, Faculty of Economics, Riau University
Pekanbaru, Indonesia*

E-mail : nurlaili_93@yahoo.com

*Effect Of Financial Statements Presentation Of Financial Statements And
Accessibility Of Regional Financial Management Accountability
(Studies In SKPD Bengkalis)*

ABSTRACT

This study aims to (1) examine the effect of the financial statement presentation of the financial management accountability and (2) examine the effect of the accessibility of the financial statements to the accountability of financial management. The method used in this research is total sampling method. Data of this study uses primary data, directly through a questionnaire and analyzed using SPSS version 20. The data were analyzed to test the hypothesis using multiple regression analysis approach. The results showed that the effect on the financial statement presentation of financial management accountability and accessibility affect the accountability of financial management. The test results which found significant results due to the better presentation of the financial statements and the accessibility of the financial statements will be good also government against users of financial statements.

Keywords: financial statements, accessibility, accountability, and financial management

PENDAHULUAN

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik dipusat

maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui

suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Permasalahan akuntabilitas publik menjadi sangat penting sejak dilaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu sejak Januari 2001, salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektifitas, serta penegakan hukum. Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik (Sukhemi, 2010).

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam organisasi yang mengelola dana masyarakat, pemerintah harus mampu memberikan pertanggungjawaban pada masyarakat melalui laporan keuangannya. Semakin baik pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah akan meningkat. Untuk meningkatkan akuntabilitas publik, pemerintah perlu mengakses laporan keuangan yang dibuatnya agar masyarakat dengan mudah memperoleh laporan keuangan

tersebut. Aksesibilitas merupakan suatu cara untuk memperoleh informasi laporan keuangan dengan mudah melalui media seperti, surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP – DPP) atas LKPD Kabupaten Bengkalis TA 2013.

BPK sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menilai laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis TA 2013 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2013, realisasi anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Adapun paragraf penjelasan adalah (1) Kegiatan pengendalian dan monitoring Belanja Hibah perlu ditingkatkan. Atas Belanja Hibah yang direalisasikan Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Tahun Anggaran 2013, terdapat kelompok penerima yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan hibah kepada Bupati; dan 2) Kegiatan inventarisasi aset tetap masih perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan menetapkan kebijakan penyusutan. Saldo Aset Tetap di Neraca belum memperhitungkan nilai penyusutan dan terdapat tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum didukung oleh bukti kepemilikan yang memadai. (<http://pekanbaru.bpk.go.id/?p=18361>)

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah masih

belum seluruhnya memenuhi kriteria akuntabilitas. Dengan bukti masih ada paragraf penjelasan yang menyatakan masih adanya kelompok yang belum menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis sebagai suatu entitas pengelolaan masih mengalami kesulitan untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Mengingat bahwa akuntabilitas merupakan salah satu unsur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis? (2) Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis?

Tujuan penelitian ini antara lain: (1) Untuk menguji kembali pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (2) Untuk menguji kembali pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

TELAAH PUSTAKA

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai

dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007).

Pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006).

Aksesibilitas Laporan Keuangan

Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media

seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet dalam Mulyana, 2006).

Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, menurut Diamond (2002), pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana. Informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (a) meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola; (b) meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah asset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. (c) memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban; (d)

Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan (Diamond 2002).

Tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri (Sujana, 2002 dalam Rohman, 2009). Sedangkan para pengguna laporan keuangan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu laporan keuangan yang disusun pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna (Wilson dan Kattelus 2002 dalam Rohman 2009).

Penelitian Terdahulu

Peggy Sande (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berbeda dengan Frans (2011) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Diwilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasandutan, dan Kabupaten Samosir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sedangkan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

Namun berbeda dengan Yuni Sastra (2013) meneliti tentang pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan, yang mana hasil penelitiannya mengatakan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bengkalis. Pemilihan sampel penelitian ini didasarkan pada metode *total sampling* yaitu seluruh populasi dijadikan sampel, dimana yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat pengelola keuangan pada masing-masing SKPD yang ada di Kabupaten Bengkalis sebanyak 36 SKPD terdiri dari 2 sekretariat, 1

inspektorat, 13 badan, 2 RSUD, 17 Dinas dan 1 kantor. Responden dalam penelitian ini adalah kepala SKPD dan Kasubag keuangan, yaitu orang yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah, sehingga responden berjumlah 72 orang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya. Data primer berupa jawaban langsung dari penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada responden (kepala SKPD dan Kasubag keuangan).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengukur antara variabel independen (penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan keuangan) terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah) (Ghozali, 2006). Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y= Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

a = Konstanta

b₁, b₂= Koefisien Regresi

X₁= Penyajian Laporan Keuangan

X₂= Aksesibilitas Laporan Keuangan

e= Standar Error

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai

dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim : 2006).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Keuangan daerah dalam penelitian ini akan diukur dengan skala Likert. Sekaran (2006, 33) mengemukakan bahwa Skala likert didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala lima titik. Akuntabilitas pengelolaan Keuangan daerah diukur menggunakan instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian terdahulu oleh Peggy Sande (2013).

Penyajian Laporan Keuangan (X₁)

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Bastian, 2006).

Karakteristik pemahan atas penyajian laporan keuangan diadopsi dari penelitian Sande (2013) diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu: relevan, andal, tepat waktu, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Aksesibilitas Laporan Keuangan (X₂)

Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik akan mewujudkan komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. Proses inilah yang mendukung penggunaan informasi keuangan daerah yang efektif. Aksesibilitas laporan keuangan diukur menggunakan kuesioner yang diajukan kepada responden, pengukuran variabel aksesibilitas laporan keuangan diadopsi dari Peggy Sande (2013) dengan 2 (dua) indikator seputar aksesibilitas laporan keuangan dipemerintah daerah yaitu; laporan keuangan dapat diakses dan laporan keuangan dipublikasikan melalui media umum, dan memberikan kemudahan kepada para pengguna.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan gambaran tentang ringkasan data dari masing-masing variabel yang akan masuk dalam proses pengujian, tujuannya adalah untuk memudahkan dalam memahami data, dimulai dari jumlah data (N), Nilai Rata-Rata (Mean), Nilai Maksimum, Nilai Minimum, Standar Penyimpangan Data (Std Deviasi), Variance, Skewness, dan Kurtosis.

Salah satu pendekatan deskriptif dapat dilihat melalui frekuensi yaitu untuk mengetahui atau menjelaskan kelompok data berdasarkan atas gejala pusat (*tendency central*) dari kelompok tersebut.

Statistik Deskriptif Variabel dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	59	27,00	40,00	34,4915	3,01932
Penyajian Laporan Keuangan	59	25,00	40,00	33,7966	3,62358
Aksesibilitas Laporan Keuangan	59	6,00	15,00	11,2203	2,59355
Valid N (listwise)	59				

Sumber : Data Olahan (2015)

Dari tabel 1 untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat bahwa nilai maksimum sebesar 40,00 dan minimum 27,00, kemudian nilai rata-rata untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 34,4915 dengan standar deviasi 3,01932. Variabel Penyajian Laporan Keuangan memiliki nilai maksimum 40,00 dan minimum 25,00, kemudian nilai rata-rata untuk variabel Penyajian Laporan Keuangan adalah 33,7966 dengan standar deviasi 3,62358. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki nilai maksimum 15,00 dan nilai minimum 6,00, kemudian nilai rata-rata untuk variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan 11,2203 dengan standar deviasi 2,59355.

Hasil Pengujian Kualitas Data
Hasil Uji Validitas Data

Dalam penelitian ini pengujian validitas menggunakan nilai

Correlated Item–Total Correlation. Nilai r_{hitung} yang diperoleh dengan penelitian ini dibandingkan dengan r_{tabel} untuk menguji validitas data. Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Pada penelitian ini diperoleh $df = 59 - 2 = 57$ dengan tingkat signifikan 5%. Nilai r_{tabel} dengan derajat bebas (df) 57 adalah 0,256.

Hasil Uji Reliabilitas Data

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

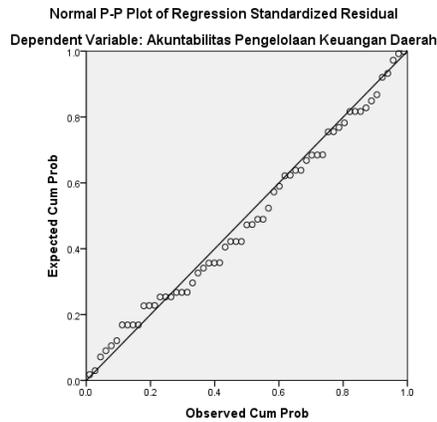
No	Variabel	Jumlah Item	Koefisien Cronbac'h Alpha	Keterangan
1	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	8	0,687	Reliabel
2	Penyajian laporan keuangan	8	0,845	Reliabel
3	Aksesibilitas laporan keuangan	3	0,783	Reliabel

Sumber: Data Olahan (2015)

Uji Reliabilitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel (Ghozali, 2013:47). Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil. Pengukuran reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja, kriteria pengujian reliable adalah sebagai berikut:

- *Cronbach Alpha* > 0,6 konstruk (variabel) memiliki reliabilitas
- *Cronbach Alpha* ≤ 0,6 konstruk (variabel) tidak memiliki reliabilitas

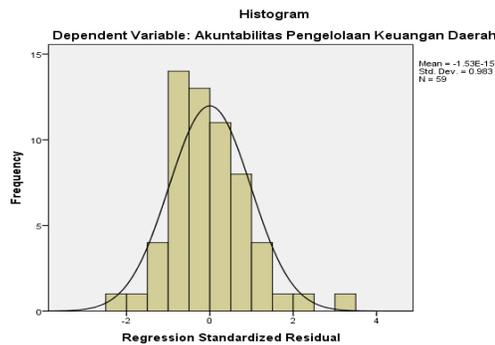
Gambar 1
Hasil Uji Dengan Menggunakan P-Plot



Sumber : Data Olahan (2015)

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa untuk variabel dalam penelitian ini titik menyebar disekitar garis diagonal. Dengan demikian berarti data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

Gambar 2
Hasil Grafik Histogram



Sumber: Data Olahan (2015)

Grafik histogram pada gambar 2 diatas telah memperlihatkan posisi yang normal, dimana tidak terjadi posisi miring (*skewness*) dan kurva memiliki keseimbangan tepat ditengah, dengan demikian menunjukkan bahwa data-data pada variabel penelitian berdistribusi normal (Ghozali, 2006).

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity	Statistics	Keterangan
	Tolerance	Vif	
(Constant)			
Penyajian Laporan Keuangan	.577	1.734	Bebas Dari Multikolinieritas
Akuntabilitas Laporan Keuangan	.577	1.734	Bebas Dari Multikolinieritas

Sumber: Data Olahan (2015)

Tabel diatas menunjukkan bahwa keseluruhan nilai tolerance yang dihasilkan dalam penelitian ini berada diantara 0.1-1.0, dan nilai VIF diantara 1.0-10. Dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi multikolinieritas.

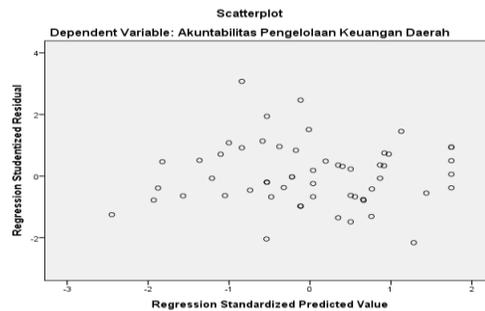
Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.639 ^a	.408	.387	2.36339	1.627

Sumber: Data Olahan (2015)

Hasil uji Durbin watson menunjukkan angka 1,627 untuk dependen berarti Durbin Watson berada antara -2 sampai dengan +2, dengan demikian tidak ada autokorelasi dan data menunjukkan layak untuk diteliti.

Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan (2015)

Gambar 3 berikut ini merupakan gambar hasil uji heteroskedastisitas dimana diagram pencar yang ada tidak membentuk pola atau acak, maka regresi pada penelitian ini tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas.

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		t	Sig.	keterangan
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	19.891	2.996		6.638	.000	
Penyajian Laporan Keuangan	.299	.113	.358	2.649	.010	Berpengaruh
Aksesibilitas Laporan Keuangan	.402	.158	.345	2.549	.014	Berpengaruh

Sumber : Data Olahan (2015)

Berdasarkan hasil analisis regresi diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = 19,891 + 0,299 X_1 + 0,402 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

X₁ = Penyajian Laporan Keuangan

X₂ = Aksesibilitas Laporan Keuangan

e = Standar Error

Hasil Pengujian Hipotesis Dan Pembahasan

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah

Dari tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,649 > 2,004$ dengan nilai signifikansi diperoleh adalah $0,010 < 0,05$. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima

yaitu: Ha₁: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Hasil pengujian yang menemukan hasil signifikan dikarenakan Semakin baik penyajian laporan keuangan daerah tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan secara lengkap dan jujur maka laporan keuangan akan transparansi dan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anies Iqbal Mustofa (2012), yang mengemukakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Frans (2011) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dikarenakan pada umumnya penyajian laporan keuangan daerah telah akuntabel.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari tabel 4.6 diatas terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,135 > 1,986$ dengan nilai signifikan diperoleh

sebesar $0,018 < 0,05$. Dari hasil pengujian terlihat, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yaitu: H_2 Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan terciptanya aksesibilitas laporan keuangan berdampak baik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, karena pemerintah dapat mewujudkan transparansi terhadap laporan keuangan kepada masyarakat (pengguna). Sehingga pemerintah telah menciptakan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan dengan baik.

Aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan penyebab dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena kemudahan aksesibilitas menjadikan akuntabilitas terhadap laporan keuangan daerah tersebut. Selain menyajikan laporan keuangan, hal lain yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan akses laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan. Alasannya adalah menyajikan laporan keuangan tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan maksimal sehingga dapat dikatakan bahwa dengan memberikan kemudahan akses kepada para pengguna laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan terwujudnya kepercayaan publik kepada pemerintah daerah Peggy Sande (2013).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Peggy Sande (2013) yang menyatakan bahwa aksesibilitas mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tetapi bertolak belakang dengan Sastra (2013) yang menyimpulkan bahwa aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ketidak konsistenan penelitian ini dengan penelitian Sastra (2013) dapat disebabkan karena hasil jawaban responden yang berbeda.

Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.639 ^a	.408	.387	2.36339	1.627

Sumber: Data Olahan (2015)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 6 diatas, diperoleh R Square sebesar 0,408. Hal ini menunjukkan variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan memberikan pengaruh sebesar 40,8% terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan sisanya 59,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain Efektifitas pengelolaan keuangan daerah dan Sistem Akuntansi keuangan daerah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

penelitian ini, menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain : (1) Hasil pengujian hipotesis pertama

menemukan bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan daerah tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan secara lengkap dan jujur maka laporan keuangan akan transparansi dan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (2) Hasil pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jadi memberikan kemudahan akses kepada para pengguna laporan keuangan akan menciptakan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan terwujudnya kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.

Keterbatasan

penelitian ini masih banyak keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, antara lain: (1) Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu Kabupaten. Sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih jelas maupun digeneralisir kesemua objek mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (2) Pada penelitian ini jumlah kuesioner yang dapat digunakan hanya 81,95% dari keseluruhan kuesioner yang disebarkan (100%). Hal ini disebabkan banyaknya responden yang tidak terlalu peduli terhadap pengisian kuesioner karena kesibukan dan

keterbatasan waktu yang mereka miliki. Sehingga beberapa kuesioner ada yang hilang bahkan tidak diisi. (3) Peneliti tidak mendampingi responden secara langsung pada saat pengisian kuesioner karena keterbatasan waktu. Sehingga responden tidak bisa menanyakan langsung terhadap pertanyaan yang tidak dimengerti. (4) Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner. Hal ini dapat menyebabkan masalah subjektivitas dari responden yang dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti menyarankan agar: (1) Agar dapat memastikan bahwa kuesioner yang dikirim benar-benar diisi oleh objek yang diinginkan peneliti maka penelitian selanjutnya seharusnya diperkuat dengan metode wawancara atau observasi secara langsung. (2) Penelitian yang akan datang diharapkan dapat memperluas objek penelitian, misalnya mengambil sampel pada SKPD yang ada di beberapa kabupaten bahkan se-Provinsi Riau. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan memberikan gambaran yang lebih jelas. (3) Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang memungkinkan dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (4) Untuk SKPD yang ada di Kabupaten Bengkalis terutama pimpinan SKPD supaya bisa melakukan pembahasan atau sosialisasi dengan para staf bagian keuangan bahwa perlunya transparansi

dan akuntabilitas laporan keuangan SKPD supaya masyarakat bisa mengakses atau mengetahui secara rinci laporan keuangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013. (<http://www.bpk.go.id/>)

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.

Gusminarti, MS, Ridha. 2014. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi kasus terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten kampar provinsi riau). Skripsi akuntansi universitas riau.

Halim, Abdul. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

_____, 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

<http://www.bengkalis.kab.go.id/statis-21-satuankerja.html>

Judika, Frans.2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Skpd Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Skpd Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Skpd, *Tesis* Universitas Sumatera Utara.

Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.

_____, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mulyana, Budi.2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.

Mustofa, Anies Iqbal. 2012. Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.

Rafita Sari, Reny. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Siak). *Skripsi Akuntansi Universitas Riau*.

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- _____, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rohman, Abdul. 2009. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Pemda Dijawa Tengah)*. Jurnal Akuntansi & Bisnis Vol. 9 No1 ISSN 1412-0852.
- _____, 2011. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas)*, Jurnal. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sande, Peggy. 2013. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Skripsi Universitas Negeri Padang.
- Sastra, Yuni. 2013 *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Skripsi, Universitas Negeri Medan.
- Sekaran, Uma. 2009. *Research Methods For Business (Metode Penelitian Bisnis)*. Salemba Empat: Jakarta.
- Shende, Suresh dan Tony Bennet. 2004. *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration*. UN DESA.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.